

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A"an Efendi, Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administras*. Sinar Grafika; Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Gratifikasi; Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chayaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia; Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Burhan Asshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta; Jakarta.
- Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung; Nusa Media).
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum*. Mira Buana Media; Yogyakarta.
- Lis Sutinah. 2016. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*. Jakarta; Visimedia.
- M.Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi. 2016. *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*. Erlangga; Jakarta.
- Marigan Masry Simbolon. 2004. *Dasar-dasar Administrasi Negara dan manajemen*. Ghalia Indonesia; Jakarta.
- Muhammad Syahrudin. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan skripsi dan Tesis*. CV;DOTPLUS.
- Philippus M Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*. Gadjah Mada University Press; Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Sistem Penyelenggara Pemerintah*. Gramedia; Surabaya.
- Aminuddin Iimar. 2018. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta; Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta; Kencana.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada).
- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Safri Nugraha, dkk. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- S. F, Marbun. 2013. *Hukum Administrasi Negara II, Cetakan 1*. FH UH Press.
- Sirajuddin, dkk. 2012. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Setara Press; Malang.
- Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari. 1993. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat Alumni*; Bandung.
- Suriansyah Murhani. 2009. *Kewenangan Pemerintah Dalam Mengurus Bidang Pertanahan*. Laksbang Justitia; Surabaya.
- W. Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur ; Sinar Grafika.
- M.Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi. 2016. *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*. Erlangga; Jakarta.
- Muhammad Syahrudin. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan skripsi dan Tesis*; CV. DOTPLUS.

#### **SKRIPSI/TESIS**

- Andi Fildah Ramadani, 2017, *Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Soppeng*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Arif Fahriadi, 2017, *"Efektivitas Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) Huruf A dan B Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi di UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu)"*, Tesis, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

#### **JURNAL/ARTIKEL ILMIAH**

- Acmad Sodik Sudrajat. *"Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dhubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah"*. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. VII Nomor 3 September 2010. Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung.
- Akhmad Munawar. *"Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia"*; Volume 7, No 13 2021.
- Bukhari Yasin. *"Tinjauan Yuridis Restorative Justice Terhadap Hak-hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tentang Perkara Pencabulan Anak Di Bawah Umur"*. Fakultas Hukum Univesitas Bojonegoro; Volume 3 No. 2 Januari 2021.
- Mustafa Bola, Muhammad Ashri, Zulkifli Aspan, Muh. Ihsan Arisaputra, Romi Librayanto, Eka Merdekawati Djafar, dan Dian Utami Mas Bakar. *"Pembinaan Kesadaran Hukum bagi Anak dan Remaja"*.

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Perspektif Hukum; Vol. 16 No. 2 2016.

Philipus M. Hadjon. "Tentang Wewenang". Makalah. Universitas Airlangga. Surabaya. Volume 7 no 5-6; September – Desember 2017.

Rini Fitriani Peranan. "*Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*". Volume 11. Nomor 2; Juli-Desember 2016.

Shinta Larasaty, Eddy Fadlyana. "*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*". Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran/RS Dr Hasan Sadikin Bandung. Volume 11, No. 2; Agustus 2023.

Titing Sugianti. "*Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak*". Jurnal Legal Reasoning Volume 4. Nomor 1; Desember 2021.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)

Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Maros Tahun 2021-2026

Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 165 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan.

Peraturan Bupati Maros Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak)

## **INTERNET / WEBSITE**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dp3ap2kb/files/pernikahan-anak-3801.pdf.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023, Pukul 17.43 WITA.

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/perlindungan.html>. Diakses pada tanggal 26 January 2023.

Hukum Perdata: Syarat-syarat perkawinan”, <http://kuliahade.wordpress.com/2010/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/>, diakses pada tanggal 14 february 2023.

Kemen PPA Terapkan Lima Strategi Pencegahan Perkawinan Anak. <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/06/17/kemen-pppa-terapkan-lima-strategi-pencegahan-perkawinan-anak/> diakses pada tanggal 29 Maret 2023.

Perubahan renja SKPD Tahun anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros. <https://ppid.maroskab.go.id/assets/dokumen/fdc259c6a8d3381fb1664eaaab640ae1.pdf> diakses pada tanggal 16 Maret 2023.

Tugas pokok dan Fungsi BKKBN, <https://www.bkkbn.go.id/pages-tugas-pokok-dan-fungsi-2012044810-466> diakses pada tanggal 26 juni 2023.

Profil Kabupaten Maros-Website Resmi Kabupaten Maros <https://maroskab.go.id/geografi/diakses> pada tanggal 3 Juni 2023.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros <https://ppid.maroskab.go.id/page/profilopd/50/Dinas%20Pemberdayaan%20Perempuan,%20Perlindungan%20Anak,%20Pengendalian%20Penduduk%20dan%20Keluarga%20Berencana> diakses pada tanggal 27 juni 2023.

Humas Pengadilan Agama Kabupaten Maros <https://makassar.tribunnews.com/2021/11/22/357-anak-di-bawah-umur-menikah-di-maros-tahun-ini-80-persen-akibat-pergaulan-bebas> di akses pada tanggal 16 July 2013.

Mencegah Perkawinan anak di Desa <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/mencegah-perkawinan-anak-di-desa> diakses pada tanggal 2 July 2023

Pernikahan anak di bawah umur di Maros meningkat <https://beritakotamakassar.com/berita/2021/11/25/pernikahan-anak-umur-maros-meningkat/> diakses pada tanggal 2 July 2023

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Bougenville Maros Provinsi Sul-Sel Tlp. (0411) 371055 Kabupaten Maros (90511)*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800 / 534 / DP3A DA LDUU KB / VI / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. HUSAIR, MM**  
NIP : 19630603 199003 1 007  
Pangkat/Gol : Pembina Utama muda, IV/c  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Maros


Menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD AGUNG PERDANA AZHARY**  
Nomor Pokok : b021191012  
Jurusan : S1 Fakultas Hukum  
Mahasiswa : UNHAS Makassar

Berdasarkan Surat Izin Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 274/ VI/ IP/ DPMPSTP/ 2023 Tanggal 05 Juni 2023, maka Mahasiswi bersangkutan telah disetujui untuk melakukan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**“ PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAROS  
NOMOR 21 TAHUN 2020 “**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 13 Juni 2023  
**KEPALA DINAS,**  
  
**Drs. H. HUSAIR, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19630604 199003 1 007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 089/UN4.5.1/PT.00/2023

Lampiran : -

Hal : PENELITIAN

Makassar, 04 Januari 2023

Kepada

Yth.

1) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
di,  
TEMPAT 2) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : MUHAMMAD AGUNG PERDANA A  
No. Pokok : 302191012  
No. HP :  
Prog. Studi : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
Bagian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Alamat : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
Pembimbing : 1. EKA METDEKAWATI DARAF, S.H., M.H  
2. ATINI NUR ANNISA, S.H., M.H

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2020  
Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;



#generated\_by\_law\_information\_system\_fh-uh in 2023-01-27 12:12:58